

KESIAPAN PEREMPUAN DI PARLEMEN

KARYA ILMIAH



OLEH :

IR. SUMIHAR HUTAPEA, MS
NIP. 131 257 284



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS PERTANIAN
M E D A N
2002

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan kasihnya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan judul **Kesiapan Perempuan di Parlemen** yang memuat tentang perempuan yang berpotensi di Indonesia dan di negara lain serta kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam mengembangkan dirinya di parlemen.

Tulisan ini merupakan studi literature yang memuat berbagai hasil seminar /penelitian dan diharapkan menjadi masukan kepada pembaca sehubungan dalam pengembangan informasi tentang keberadaan perempuan diparlemen dan upaya yang dicapai untuk mengembangkan potensi perempuan untuk duduk di parlemen.

Dengan selesainya Karya Ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ir. Abdul Rahman, MS, sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area yang telah memberi persetujuan kepada penulis untuk dapat membagi waktu menyusun suatu Karya Ilmiah sebagai pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Ucapan yang sama penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian tulisan ini, terutama dalam penyediaan pustaka.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini masih sederhana dan banyak kelemahan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Medan, November 2002

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. KENDALA YANG DIHADAPI PEREMPUAN DI PARLEMEN.....	5
1. Pengalaman di Indonesia	5
2. Pengalaman dari Negara Lain	13
3. Model Maskulin Politik	16
4. Kurangnya Dukungan Partai	18
5. Kerjasama Dengan Organisasi Perempuan.....	20
6. Pendidikan dan Pelatihan	23
7. Kendala-kendala Sosio-Ekonomi	24
8. Feminisasi Kemiskinan dan Pengangguran	25
9. Beban Ganda	29
III. TANGGAPAN PUBLIK TERHADAP PEREMPUAN DI PARLEMEN	33
1. Kurangnya Kepercayaan	33
2. Persepsi Politik Sebagai Hal Kotor.....	33
3. Peran Media Massa.....	36
IV. KESIMPULAN	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41

BAB I PENDAHULUAN

Partisipasi sejajar perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah semata-mata sebuah tuntutan akan keadilan demokrasi, namun juga dapat dilihat sebagai syarat penting agar kepentingan kaum perempuan dapat diperhitungkan. Partisipasi sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik adalah salah satu prinsip mendasar yang diamanatkan di dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women atau CEDAW) yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1979 dan disahkan mulai tahun 1981. sekarang, lebih dari 20 tahun sejak ditandatanganinya konvensi itu (yang juga telah diratifikasi oleh 165 negara), kenyataan menunjukkan bahwa kaum perempuan di seluruh pelosok dunia masih saja termarginalisasi dan kurang terwakili di berbagai aspek.

Pada tahun 1995, Platform Aksi Beijing mengidentifikasi adanya “kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan pada semua tingkat” dan kurangnya mekanisme pada semua level dalam upaya memajukan perempuan,” yang merupakan dua wilayah penting dalam kerangka perjuangan memajukan kaum perempuan. Dalam tahun 2002, kendati sudah ada prestasi yang signifikan di bidang hukum baik di level internasional maupun nasional, ditunjang pula oleh berbagai aktivitas dan mobilisasi selama bertahun-tahun, partisipasi perempuan di panggung politik sebagai mitra sejajar laki-laki belum juga menuai keberhasilan.

Di masa kini, langkah mengaitkan demokrasi dengan kesejajaran gender merupakan prinsip yang sudah diterima secara luas. Salah satu credo penting dari tiap kerangka kerja demokrasi adalah prinsip hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak politik bagi laki-laki dan perempuan. Pengembangan setiap agenda politik yang tidak dimasukkan unsur perspektif, pandangan dan pengalaman dari pihak-pihak yang akan terkena dampak agenda tersebut kini tidak lagi dapat diterima. Namun, lepas dari segala daya upaya yang dirintis selama sekian abad oleh tokoh-tokoh perempuan terkemuka – dan beberapa laki-laki pula – pengakuan dan pelaksanaan hak-hak politik dan sosial ekonomi antara laki-laki dan perempuan masih saja belum seimbang. Kaum perempuan adalah separuh populasi dunia, 50 persen dari total tenaga kerja, namun mereka juga adalah sekitar satu milyar manusia yang hidup dalam belenggu kemiskinan. Pengambilan keputusan dan penyusunan prioritas tetap saja berada ditangan kaum laki-laki.

Perempuan ingin ikut membentuk keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka beserta keluarganya, takdir politik dan ekonomi komunitas dan negara mereka, serta struktur dari hubungan internasional yang ada. Partisipasi politik dan perwakilan adalah elemen-elemen penting bagi tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Di seluruh dunia, kaum perempuan hanya menempati 14.3 persen dari total anggota parlemen yang ada. Rata-rata peresentase global kaum perempuan yang menjadi anggota parlemen di setiap wilayah regional kurang lebih sama saja, kecuali untuk negara-negara di kawasan Nordik yang mana kaum perempuannya rata-rata mencapai tingkat keterwakilan 40 persen di lembaga-lembaga legislatif. Di ujung jauh dari spektrum tersebut adalah negara-negara Arab

dimana perempuannya hanya menempati porsi 4,6 persen dari total anggota dewan legislatifnya. Kawasan Asia Tenggara pun tidak berbeda jauh dari kecenderungan global ini. Dengan tingkat perwakilan perempuan yang rata-rata hanya 12,7 persen di majelis rendah, kawasan Asia Tenggara menunjukkan fakta bahwa penertaan dan partisipasi penuh kaum perempuan dalam kehidupan publik merupakan salah satu tantangan dan perkembangan terbesarnya dalam kehidupan berdemokrasi.

Dalam konteks ini, nampak bahwa tugas yang membentang ke depan masih sangat banyak : tindakan tegas dari pemerintah, komitmen partai-partai politik, dan transformasi sosial untuk mengubah persepsi keliru (tentang perempuan) yang selama ini telah mendominasi konsepsi kita tentang hubungan kemasyarakatan. Perlu juga ditanggalkan pola-pola tradisional dan pemahaman mengenai peranan dan posisi perempuan di dalam politik perlu juga dihargai dengan mengubah persepsi tentang kekuasaan dan dengan menggugurkan persepsi usang bahwa kehidupan publik (politik) merupakan wilayah dominasi laki-laki. Tantangan terberat untuk kawasan Asia Tenggara adalah bagaimana cara meningkatkan konsolidasi demokrasi yang melibatkan sekaligus mendukung partisipasi dan mobilisasi perempuan dari berbagai latar belakang status dan asal usul. Kami sungguh berharap buku ini dapat memberikan kontribusi efektif dalam upaya mengatasi tantangan ini, dengan membagi pengalaman, strategi dan peluang-peluang untuk menggalang solidaritas internasional dan regional.

Perempuan di seluruh dunia pada setiap tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Sementara arena permainan politik di setiap negara mempunyai karakter

tersendiri, ada sebuah gambaran umum yang tetap bagi semua : yakni bahwa hal itu tidak seimbang dan tidak kondusif bagi partisipasi perempuan. Perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik, menemukan kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak bersahabat atau bahkan bermusuhan dengan mereka. Bahkan secara sepintas, komposisi pengambilan keputusan politik sekarang di berbagai wilayah memberikan bukti bahwa perempuan tetap menghadapi sejumlah kendala dalam mengartikulasikan serta menentukan kepentingannya.

BAB II

KENDALA YANG DIHADAPI PEREMPUAN DI PARLEMEN

1. Pengalaman di Indonesia

Sejarah tentang representasi perempuan di parlemen Indonesia merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Kongres Wanita Indonesia pertama, pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme dikalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik. Dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1955, 6,5 persen dari anggota parlemen mengalami pasang surut, dan mencapai angka tertinggi sebesar 13,0 persen pada tahun 1987. Saat ini jumlah perempuan mencapai 8,8 persen dari seluruh anggota perwakilan terpilih.

Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Oleh karena itu, berbagai strategi harus dipelajari secara simultan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen bisa diwujudkan. Studi kasus ini menyajikan tingkat representasi politik perempuan di Indonesia, dan mengkaji beberapa dari hambatan yang menghalangi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Selain itu, ditawarkan berbagai strategi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan keterwakilan ini.

Dalam kondisi politik normal, pemilihan umum di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum pertama diadakan sepuluh tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan pada tahun 1955,

dibawah pemerintahan Soekarno. Pemilu kedua tidak dilaksanakan karena konstituante yang bertugas mengamandemenkan UUD 1945 tidak dapat menyelesaikan tugasnya, sehingga pada tahun 1959 pemerintah mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945. Indonesia menjadi negara demokrasi terpimpin. Pada tahun 1965 terjadi peralihan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru, tanpa melalui proses pemilihan umum.

Setelah transisi ini, pemilihan umum secara berturut-turut diadakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. semua pemilihan ini terjadi pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Peralihan dari pemerintahan Soeharto ke B.J. Habibie setelah Pemilu 1997 diikuti oleh satu pemilihan yang dipercepat pada tahun 1999. pada saat ini, rakyat yang dimotori oleh mahasiswa, menurut reformasi, yang memainkan peranan besar dalam mengantarkan seorang pemimpin baru nasional, Abdurrahman Wahid, pemimpin dari sebuah partai baru.

Perubahan dalam cara penyelenggaraan pemilu, dengan jumlah partai politik yang cukup besar dibawah pemerintahan Orde Lama, menjadi tiga partai di bawah rezim Orde Baru, kemudian berkembang menjadi 48 partai di era reformasi, menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pola representasi perempuan dalam berbagai lembaga negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada berbagai tingkatan administrasi pemerintahan.

Meskipun secara nasional, sejak pemilu tahun 1955, unsur perempuan selalu terwakili di DPR dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), persentase keterwakilan mereka menunjukkan perbedaan. Kongres Wanita Indonesia Pertama pada tahun 1928 merupakan tonggak sejarah bagi wanita Indonesia dalam upaya

memperluas peran publik mereka, khususnya dalam politik. Dalam forum ini organisasi-organisasi perempuan dari beberapa kelompok etnis, agama dan bahasa dipersatukan.

Kemunculan dan perkembangan organisasi-organisasi ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas diri perempuan, seperti meningkatkan kemampuan manajemen, memperluas wawasan, dan mengembangkan jaringan. Organisasi dan gerakan wanita ini meningkatkan posisi tawar perempuan, sebagaimana terlihat dari frekuensi keterlibatan para pemimpin organisasi-organisasi tersebut dalam berbagai kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan instansi lainnya. Dalam konteks politik, organisasi-organisasi yang melatih dan meningkatkan kapasitas diri perempuan ini merupakan jaringan yang efektif untuk merekrut kandidat anggota legislatif. Pada pemilihan umum pertama tahun 1955, beberapa calon anggota legislatif perempuan merupakan anggota organisasi perempuan yang berafiliasi pada partai. Pada pemilu berikutnya, ada kecenderungan bahwa kandidat anggota legislatif berasal dari kalangan pimpinan organisasi-organisasi perempuan yang bernaung dibawah partai atau berafiliasi dengan partai.

Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga. Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang, baik laki-laki maupun, membuka kesempatan luas bagi para wanita

untuk berkiprah di luar lingkup domestik dengan tanggung jawab urusan rumah tangga. Masyarakat menerima dan menghargai para pejuang perempuan yang ikut berperan di medan perang, dalam pendidikan, dalam pengobatan, dan dalam pengelolaan logistik. Kesempatan ini memberi kemudahan pada perempuan untuk memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan mereka atau yang terjadi di sekitar mereka, selain isu politik.

Pada pemilihan umum tahun 1955, pada masa Orde Lama, jumlah perempuan di DPR mencapai 17 orang, empat diantaranya dari organisasi Gerwani dan lima dari Muslimat NU. Pemilihan umum pertama dinilai sebagai demokratis, dengan partisipasi perempuan dalam politik didasarkan pada kemampuan mereka sebagai pemimpin dari unit-unit yang ada dalam organisasi-organisasi partai.

Berbeda dengan periode Orde Lama (era Soekarno), pada masa Orde Baru (era Soeharto) dengan konsep partai mayoritas tunggal, representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan dalam institusi-institusi kenegaraan, ditetapkan oleh para pemimpin partai di tingkat pusat, sejumlah tertentu elit. Akibatnya, sebagian perempuan yang menempati posisi penting memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan para pejabat dan pemegang kekuasaan di tingkat pusat. Hal ini dimungkinkan karena dalam sistem pemilu proporsional pemilih tidak memilih kandidat (orang), tetapi simbol partai, untuk berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak melewati tahapan dalam proses pencalonan/pemilihan, dan mungkin tidak memiliki kemampuan mengartikulasikan kepentingan konstituennya.

Dalam pemilihan umum 1999, proses pemilihan mengalami perubahan cukup berarti, dimana rekrutmen kandidat partai untuk lembaga legislatif, termasuk perempuan, harus disetujui oleh daerah, para pengambil keputusan partai di daerah (hal ini tidak berlaku bagi wakil dari angkatan bersenjata dan polisi). Sebagian besar wakil perempuan yang terpilih berpartisipasi dalam proses pemilu, antara lain dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat diskusi, ceramah, dan kegiatan partai lainnya yang berhubungan dengan kampanye pemilu.

Bersama dengan institusi-institusi lain, MPR memiliki tanggung jawab untuk membuat dan memperbaharui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk pedoman pelaksanaan pemerintahan dan berbagai kebijakan nasional. Sejak tahun 1988, GBHN telah mengandung ketentuan-ketentuan mengenai peranan perempuan, selain keberadaan Menteri Muda Urusan Perempuan dalam kabinet. Posisi ini terus dipertahankan, sekalipun dengan nama serta visi dan misi yang berubah. Isu-isu perempuan dan yang berkembang menjadi isu gender tertuang dalam GBHN tahun 1993, 1998, dan 1999.

Dalam GBHN tahun 1999, dinyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui upaya : pertama, peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diimbangi oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kedua meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Berbeda dengan GBHN pada umumnya yang ditujukan bagi pihak eksekutif, GBHN tahun 1999 merupakan pedoman untuk diberlakukan mengikat bagi seluruh institusi kenegaraan seperti eksekutif (Presiden) yudikatif (Mahkamah Agung). Legislatif (DPR/MPR), dan lembaga pemeriksa keuangan (BPK), khususnya pernyataan tentang peningkatan kedudukan dan peran-peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara normal, tindak peraturan perundang-undangan dalam bidang politik yang mendiskriminasi perempuan. Namun, dalam kenyataan tingkat representasi wanita di badan legislatif pada berbagai tingkatan, termasuk DPRD Tingkat II (kabupaten), DPRD Tingkat I (propinsi) dan DPR RI (nasional), masih sangat rendah. Secara umum, perempuan kurang terwakili baik dalam arena politik maupun bidang lainnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Perempuan dalam Lembaga-Lembaga Politik Formal di Indonesia pada tahun 2002

Lembaga	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
MPR *	18	9,2	117	90,8
DPR*	44	8,8	455	91,2
MA *	7	14,8	40	85,2
BPK *	0	0	7	100
DPA *	2	4,4	43	95,6
KPU *	2	18,1	9	81,9
Gubernur (tingkat propinsi) *	0	0	30	100
Walikota/Bupati (tingkat Kotamadya / Kabupaten) *	5	1,5	331	98,5
Eselon IV & III **	1,883	7,0	25,110	93,0
Hakim **	536	16,2	2,775	83,8
PTUN **	35	23,4	150	76,6

Saat ini, perempuan hanya memperoleh 9,0 persen dari jumlah total wakil-wakil di DPR-Ri. Ini adalah angka terendah jumlah wakil perempuan sejak pemilihan umum tahun 1987, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Representasi Perempuan di DPR RI pada tahun 2002

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1950 – 1955 (DPR sementara)	9	3,8	236	96,2
1955 – 1960	17	6,3	272	93,7
Konstituante : 1965 – 1959*	25	5,1	488	94,9
1971 – 1977	36	7,8	460	92,2
1977 – 1982	29	6,3	460	93,7
1982 – 1987	39	8,5	460	91,5
1987 – 1992	65	13,0	500	87,0
1992 – 1997	65	12,5	500	87,5
1997 – 1999	54	10,8	500	89,2
1999 - 2004	45	9,0	500	91,0

Selanjutnya, dalam komisi-komisi Parlemen, perempuan cenderung untuk memegang jabatan-jabatan yang secara tradisi dilihat sebagai jabatan-jabatan “lembut”, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Data di atas menunjukkan bahwa penyebaran anggota legislatif perempuan dalam komisi mencerminkan pola tradisional, seperti juga pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Persentase tertinggi anggota perempuan terdapat dalam Komisi VII (yang antara lain membidangi kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan). Persentase tertinggi kedua anggota wanita ada di Komisi VI yang mengurus isu-isu yang berhubungan dengan agama, pendidikan dan kebudayaan.

Keterwakilan perempuan dalam komisi-komisi yang berwenang membahas masalah ekonomi dan politik, khususnya dalam hal representasi politik dan

kemiskinan, sangat penting, mengingat komisi merupakan salah satu institusi penentu program dan anggaran eksekutif.

Kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain disebabkan oleh kondisi budaya yang patriarkal yang tidak diimbangi kemudahan akses dalam bentuk tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti pemberian kuota GBHN, dan berbagai instrumen politik dan hukum tidak secara eksplisit menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan namun tidak pula memberikan pembelaan dan kemudahan bagi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik. Undang-Undang Dasar 1945, Bab X, Ayat 27 menyatakan bahwa “semua warga negara adalah sama dihadapan hukum dan pemerintah”, sedangkan Ayat 28 menjamin “Kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.” Sekalipun demikian, dalam kondisi yang patriarkal perempuan menghadapi beberapa kendala untuk mensejajarkan diri dengan laki-laki dalam berbagai bidang.

Tabel 3. Anggota Komisi-Komisi DPR – RI Menurut Jenis Kelamin pada tahun 2002

Komisi	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
I HANKAM *	4	7,0	53	93,0
II Hukum dan Dalam Negeri	3	4,9	53	95,1
III Pangan dan Pertanian	3	5,7	49	94,3
IV Transportasi dan Prasarana	4	7,2	51	92,8
V Industri dan Perdagangan	6	9,6	50	90,4
VI Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	6	12,5	42	87,5
VII Kesehatan dan Kependudukan	11	25,0	33	75,0
VIII IPTEK dan Lingkungan Hidup	4	7,2	51	92,8
IX Keuangan dan Pembangunan	3	5,4	52	94,5
Total (100%)	44	8,5	439	91,5

Sumber : Sekretariat DPR, 2002. Data dirumuskan ulang oleh Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum, CETRO, 2002.

* HANKAM = Pertahanan dan Keamanan

** IPTEK = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2. Pengalaman dari Negara Lain

Laki-laki mendominasi arena politik, laki-laki memformulasikan aturan permainan politik ; dan laki-laki mendefinisikan standar untuk evaluasi. Keberadaan model yang didominasi laki-laki menyebabkan apakah perempuan menolak politik secara keseluruhan atau menolak politik bergaya laki-laki. Di awal abad ke-21, lebih dari 95 persen negara di dunia menjamin dua hak demokratis perempuan yang paling mendasar : hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for elections*). Selandia Baru adalah negara pertama yang memberikan kepada perempuan hak suara pada tahun 1893; Finlandia adalah negara pertama yang mengadopsi kedua hak demokratis mendasar tersebut pada tahun 1906. sementara itu, masih ada beberapa negara yang menolak dua hak perempuan tersebut, hak memilih dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.

Menurut teori, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, didasarkan atas hak pilih, menjadi kandidat, dan melakukan pemilihan, didasarkan pada hak pilih. Namun dalam kenyataannya, hak pilih perempuan tetap dibatasi : karena pada dasarnya hanya calon laki-laki yang umumnya mempunyai hak pilih.

Hal ini benar, tidak hanya terjadi pada demokrasi parsial dan demokrasi yang sedang berkembang, tetapi juga pada demokrasi yang sudah mapan, tindak representasi perempuan yang rendah di beberapa parlemen Eropa menjadi alasan adanya penyelenggaraan terhadap hak-hak asasi fundamental mereka. Tingkat representasi yang tidak setara dalam badan legislatif mengartikan bahwa representasi perempuan yang sepatutnya menjadi suatu fungsi bagi demokratisasi, ternyata lebih berfungsi untuk mempertahankan *status quo*.

Di banyak negara, secara *de jure* terdapat banyak kesulitan, baik oleh karena hukum (peraturan) yang tidak ditaati maupun bahkan yang tidak ada hukumnya sama sekali. Sebagai contoh, hukum Argentina mengenai kuota mengharuskan semua partai untuk menominasikan 30 persen perempuan dalam posisi yang dapat dipilih dalam daftar kandidat mereka. Tanpa hukum yang demikian, jumlah anggota parlemen perempuan tidak mungkin akan meningkat sebagai akibat dari kekalahan partainya : sebagai contoh kasus yang terjadi pada pemilihan di Irlandia pada tahun 1997.

Penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan faktor-faktor sosial, struktur politiklah yang memainkan peran yang lebih menentukan dalam rekrutmen anggota parlemen perempuan. Sebagai contoh, sistem pemilihan didasarkan pada representasi proporsional, telah menghasilkan tiga hingga empat kali lebih banyak perempuan

yang terpilih di negara-negara dengan kultur politik yang sama, seperti Jerman dan Australia.

Tabel 4. Perempuan dalam Parlemen Nasional RATA-RATA DUNIA

Kombinasi Dua Majelis	14,3%	Majelis Rendah atau Tunggal	14,5%	Majelis Tinggi atau senat	13,6%
Total Anggota Parlemen	41,138	Total Anggota Parlemen	35,105	Total anggota Palemen	6,037
Perincian Gender	38,933	Perincian Gender	33,457	Perincian Gender	5,476
Laki-laki	33,351	Laki-laki	28,619	Laki-laki	4,732
Perempuan	5,582	Perempuan	4,838	Perempuan	744

RATA-RATA REGIONAL

Wilayah*	Majelis rendah atau tunggal	Majelis tinggi atau senat	Gabungan kedua majelis
Negara-negara Nordik	38,8%		38,8%
OSCE Eropa termasuk negara-negara Nordik	16,8%	14,8%	16,4%
Amerika	15,8%	16,6%	15,9%
Asia	15,6%	12,1%	15,4%
OSCE Eropantidak termasuk negara-negara Nordik	14,7%	14,8%	14,7%
Afrika Sub-Sahara	12,8%	12,8%	12,8%
Pasifik	11,3%	25,9%	12,8%
Negara-negara Arab	4,6%	2,5%	4,3%

Wilayah disusun berdasarkan urutan terbalik persentase perempuan di Majelis Rendah atau Tunggal Sumber : IPU, Women in National Parliaments, 4 Februari 2002, Lihat www.ipu.org/wmn-e/world

Generalisasi seperti ini tetap absah sepanjang terdapat kesamaan kultural, misalnya tingkat yang sama dari perkembangann sosial dan ekonomi diantara negara-negara tersebut. Sebagai contoh, di Rusia generalisasi ini tidak dapat diterapkan karena lemahnya kultur politik : terutama, banyaknya jumlah partai dan blok, struktur mereka yang terkebelakang, banyaknya perempuan yang kurang memiliki kepercayaan, dan terabaikannya kepentingan perempuan oleh partai politik. Kesadaran politik pemilih – misalnya kapasitas untuk menciptakan keputusan dan

pilihan yang koheren ketika pemungutan suara – secara nyata tidak hanya tergantung pada tingkat pendidikan formal yang memainkan peran menentukan, sebagaimana menciptakan kemauan politik untuk memperbaiki situasi.

Diantara kendala-kendala politik dihadapi perempuan, yang utama adalah :

- Kelaziman “model maskulin” mengenai kehidupan politik dan badan-badan pemerintahan hasil pemilihan;
- Kurangnya dukungan partai, seperti terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan; terbatasnya akses untuk jaringan politik; dan meratanya standar ganda;
- Kurangnya hubungan dan kerjasama dengan organisasi publik lainnya, seperti serikat dagang (buruh) dan kelompok-kelompok perempuan;
- Tiadanya sistem pelatihan dan pendidikan yang dibangun dengan baik, baik bagi kepemimpinan perempuan pada umumnya, maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya;
- Hakikat sistem pemilihan, yang barangkali atau tidak mungkin menguntungkan bagi kandidat perempuan.

3. Model Maskulin Politik

Laki-laki secara luas mendominasi arena politik; laki-laki sangat dominan dalam memformulasikan aturan-aturan permainan politik; dan laki-lakilah yang sering mendefinisikan standar untuk evaluasi. Lebih jauh, kehidupan politik sering diatur sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai laki-laki, dan dalam beberapa kasus, bahkan menurut gaya hidup laki-laki. Sebagai contoh, model politik

didasarkan pada ide “ pemenang dan pecundang”, kompetisi dan konfrontasi, bukan atas dasar saling menghormati, kalaborasi dan penciptaan konsensus. Lingkungan ini sering bertentangan dengan perempuan. Keberadaan dari model yang didominasi laki-laki ini menyebabkan perempuan menolak politik secara keseluruhan atau menolak politik gaya laki-laki. Jadi, ketika perempuan berpartisipasi dalam politik, mereka cenderung melakukannya dalam jumlah kecil.

Aspek paling penting dari Parlemen Swedia bukanlah karena kami mempunyai 45 persen wakil perempuan, tetapi mayoritas perempuan dan laki-laki membawa pengalaman sosial mereka ke dalam urusan-urusan di parlemen. Inilah yang membuat berbeda. Laki-laki membawa pengalaman tentang isu-isu kehidupan nyata, mengenai membesarkan anak, mengatur rumah tangga. Mereka memiliki perspektif yang luas dan pemahaman lebih besar. Dan kami perempuan diperbolehkan untuk menjadi diri kami sendiri, dan berperilaku sesuai dengan kepribadian unik kami. Baik laki-laki, maupun perempuan tidak harus menyesuaikan diri terhadap peran tradisional. Perempuan tidak harus berperilaku seperti laki-laki untuk memperoleh kekuasaan, laki-laki tidak mesti berperilaku sebagaimana perempuan supaya bisa mengurus anak-anak mereka. Bila pola ini menjadi norma maka kita akan melihat perubahan nyata.

Perbedaan-perbedaan diantara laki-laki dan perempuan juga muncul berkenaan dengan isi dan prioritas pembuatan keputusan, yang ditentukan oleh kepentingan, latar belakang dan pola kerja kedua jenis kelamin itu. Perempuan cenderung memberikan prioritas pada masalah-masalah kemasyarakatan, seperti jaminan sosial, pelayanan kesehatan masyarakat dan isu anak-anak.

Pola kerja yang didominasi laki-laki selanjutnya direfleksikan dalam jadwal kerja anggota parlemen, yang sering dicirikan oleh lemahnya struktur yang mendukung para ibu yang bekerja umumnya, dan bagi anggota parlemen perempuan khususnya. Perempuan mempunyai kelenturan dan kerja keras karena selain aktivitas dalam partai dan kerja para pemilihnya, mereka juga harus membantu berbagai komite, jaringan kerja dengan perempuan dalam partai-partainya, pada tingkat multipartai dan dengan perempuan di luar parlemen. Selanjutnya, mereka harus memainkan peran sebagai ibu, istri, saudara perempuan dan nenek. Sekarang ini, kebanyakan program dan masa sidang parlemen tidak disesuaikan untuk mempertimbangkan dengan teliti beban rangkap yang disandang kalangan perempuan. Banyak anggota parlemen perempuan berjuang menyeimbangkan kehidupan keluarga dengan tuntutan kerja yang sering menyita waktu, perjalanan dan fasilitas yang sedikit.

4. Kurangnya Dukungan Partai

Perempuan memainkan peran penting dalam kampanye dan memobilisasi dukungan bagi partainya, meskipun mereka jarang mengambil posisi membuat keputusan dalam struktur ini. Kenyataannya, kurang dari 11 persen dari pemimpin partai di seluruh dunia adalah perempuan.

Meskipun partai-partai politik memiliki sumberdaya untuk menyelenggarakan kampanye pemilihan, tetapi perempuan tidak memperoleh keuntungan dari sumber-sumber daya tersebut. Sebagai contoh, partai-partai tidak memberikan dukungan dana yang memadai untuk kandidat perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa

jumlah nominasi perempuan sangat berkorelasi dengan jumlah anggota parlemen perempuan terpilih : banyaknya kandidat sama dengan banyaknya anggota parlemen.

Proses seleksi dan nominasi dalam partai-partai politik juga bisa terhadap perempuan dimana “karakteristik laki-laki” ditekankan dan sering menjadi kriteria dalam menyeleksi kandidat. Lingkungan yang mendukung laki-laki dan prasangka merintangi dan mencegah secara politik kecenderungan perempuan dari keterlibatan dirinya ke dalam kerja partainya. Akibatnya terjadi peremehan terhadap perempuan sebagai politisi oleh mereka yang memberikan uang untuk kampanye pemilihan, yang selanjutnya menghalangi perempuan untuk dinominasikan. Kenyataannya, perempuan sering dicantumkan dalam daftar partai agar mereka tidak terpilih jika partainya menang secara tidak memadai dalam suatu pemilihan. Metode ini digunakan sebagai daya minat bagi pemilih. Disadari, bahwa partisipasi perempuan akan lebih baik bila diberlakukan kuota bagi partisipasi perempuan. Sebagai contoh, di Swedia, rasio 40 – 60 persen telah membuat perempuan menduduki lebih dari 40 persen dari kursi dalam parlemen belakangan ini.

Tabel 5. Ketua Parlemen yang Perempuan

1945 – 1998

Selama 52 tahun sejarah parlemen dunia, kira-kira 41 dari 186 negara yang memiliki lembaga legislatif, pada satu waktu atau lainnya dari sejarahnya, telah memilih perempuan menjadi ketua parlemen atau ketua salah satu dewan parlemen : ini terjadi 77 kali selama masa itu.

Hal-hal yang dimaksud di atas adalah 17 negara Eropa, 19 negara Amerika termasuk 9 negara Amerika latin, 3 negara Afrika, 1 negara Asia dan 1 negara Pasifik.

24 dari 41 negara ini memiliki parlemen bikameral (terdiri dari 2 badan legislatif) dan ketuanya dipercayakan kepada perempuan sedikit lebih sering di senat daripada di Majelis Rendah.

Austria adalah satu-satunya negara yang telah memilih perempuan menjadi ketua parlemen (Bundesrat) sebelum perang dunia II.

Sumber : IPU, Women Speakers of Parliament, lihat www.ipu.org/wmn-e/speakers.htm

SAMPAI DENGAN 1 MARET 2002

Dari 179 parlemen yang ada, 65 diantaranya terdiri dari dua badan legislatif.

Hanya 24 perempuan mengetuai salah satu dari 179 dewan parlemen yang ada.

Sebanyak 9.9 persen perempuan adalah presiden atau ketua parlemen.

Negara-negara yang dimaksud adalah Afrika selatan, Antigua dan Barbuda, Australia, Bahamas, Belize, Kosta Rika, Dominika, Finlandia, Georgia, India, Jamaika, Lesotho, Meksiko, republik Moldova, Spanyol, Suriname, Swedia, dan Swiss.

Sangat sulit bagi seorang perempuan untuk memutuskan masuk dalam dunia politik. Begitu ia menetapkan pilihan tersebut, maka ia harus mempersiapkan suami, anak, dan keluarganya. Begitu ia berhasil mengatasi semua kendala ini dan melamar menjadi kandidat partai, maka para kandidat laki-laki yang menjadi lawan mereka akan seketika mengarang-ngarang cerita mengenai mereka. Dan akhirnya, ketika namanya diajukan kepada para pemimpin partai, mereka tidak akan menyeleksi namanya, karena mereka khawatir akan kehilangan kursi.

5. Kerjasama Dengan Organisasi Perempuan

Selama dekade terakhir, ada peningkatan perwakilan anggota parlemen perempuan dalam kehidupan demokrasi yang sedang berlangsung. Salah satu alasan kritis dari peningkatan ini adalah akibat pengaruh dari organisasi perempuan, baik di dalam maupun di luar partai-partai politik. Organisasi-organisasi perempuan sangat

menyadari pengaruh pemilihan pluralis tunggal anggota terhadap kandidat perempuan. Mereka bekerja dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan politik untuk mengamankan perubahan pemilihan dalam rangka mempermudah pemilihan dan nominasi perempuan. Strategi ini menghasilkan peningkatan representasi perempuan dalam badan-badan legislatif.

Sebagai anggota parlemen perempuan, kami perlu membagi pengalaman kami. Hal ini dimaksudkan untuk memberi inspirasi pada perempuan. Kami tidak akan merasa bahwa kami berada dalam permainan ini, dan perempuan lain tidak akan merasa terisolasi dari proses itu. Pada setiap kesempatan, pada setiap forum, masing-masing dan setiap saat kami harus membagi informasi, gagasan, pengetahuan, kami harus yakin bahwa perempuan adalah orang yang paling banyak memiliki informasi dalam masyarakat.

Namun, dalam demokrasi-demokrasi yang baru berkembang atau berkembang sebagian terdapat kontak dan kerjasama yang terbatas antara politisi perempuan dan organisasi perempuan atau organisasi-organisasi yang berkepentingan luas lainnya seperti serikat dagang dan serikat buruh. Lebih jauh lagi, gerakan-gerakan perempuan dan kelompok-kelompok perempuan di belahan dunia ini cenderung menjaga jarak dari anggota parlemen perempuan, atau tidak memperkuat hubungan-hubungan yang terorganisir dalam bentuk komunikasi dan lobi mengenai berbagai isu yang terkait dengan usaha meningkatkan perempuan pada tingkat pengambilan keputusan. Ini merupakan suatu kasus apakah sebagai akibat dari kurangnya kesadaran terhadap manfaat potensial dari fungsi jaringan kerja, atau kurangnya sumberdaya untuk memperkuat kontak-kontak semacam ini.

Meskipun pemerintah mungkin menyatakan komitmennya mengenai bentuk-bentuk perubahan yang demokratis, namun demikian tidaklah realistis mengharapkan pemerintah sendirian mengamankan tempat yang sah bagi perempuan dalam semua lingkup masyarakat. Masyarakat madani pada umumnya, termasuk organisasi-organisasi non pemerintah dan kelompok-kelompok perempuan, harus memainkan peran dalam meningkatkan representasi perempuan. Untuk meraih keseimbangan gender dalam kehidupan politik, penting untuk memastikan bahwa komitmen kesetaraan tercermin dalam hukum dan kebijakan-kebijakan nasional. Tindakan persetujuan adalah suatu alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30 persen perempuan agar tetap berada pada semua tingkat pengambilan keputusan.

Perempuan juga harus berpikir secara hati-hati mengenai tujuan-tujuan, strategi-strategi dan taktik-taktik mereka. Penting untuk membantu perempuan yang sudah berada di parlemen agar bisa mewujudkan janji-janji mereka saerta melengkapi mereka dengan berbagai keahlian dan strategi penting untuk menjamin bahwa isu-isu perempuan dibahas dalam perdebatan dan diskursus yang berlangsung di parlemen. Untuk memperkuat dan memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam politik, penting untuk memperluas lingkup keterlibatan perempuan pada tingkat akar rumput dari gerakan perempuan dan diantara badan-badan lokal hasil pemilu. Ini juga merupakan suatu langkah penting ke arah pembangunan kepercayaan dan mempermudah proses berbagi pengalaman.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Sangat sulit bagi perempuan untuk bicara, untuk berdebat, untuk menekankan kepentingannya. Bagaimana kami dapat mendorong perempuan untuk bicara dan mengekspresikan dirinya ? Mungkin perempuan di dalam gubuk ingin mengatakan banyak hal, tetapi kami harus mendorongnya untuk berbicara – bukan tentang politik, tetapi tentang masalahnya, kehidupannya, isu-isu yang menjadi perhatiannya. Jawabannya adalah pendidikan. Pendidikan telah mengarahkan banyak perempuan dalam masyarakat saya untuk bergabung dengan partai-partai politik atau berpartisipasi dalam aktivitas politik. Pendidikan adalah saluran paling penting untuk mendorong perempuan berbicara.

Mengembangkan jajak pendapat tentang perempuan yang memenuhi syarat untuk direkrut dalam karier politik juga diperlukan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan akses pada perempuan, dari suatu tahap awal, untuk melakukan pola-pola yang kondusif mengenai kepemimpinan politik, seperti pelatihan khusus yang didasarkan pada komunitas atau organisasi-organisasi RT/RW. Pemahaman umum tentang keprihatinan atau urusan perempuan, munculnya kesadaran politik berbasis gender, keahlian lobi, dan jaringan kerja adalah penting di dalam proses pelatihan perempuan untuk karier politik. Yang terakhir, pemikiran kepemimpinan perempuan memainkan peran khusus, karena hal ini adalah tempat dimana dapat dilakukan kaitan antara kelompok-kelompok perempuan yang lebih luas dengan para politisi perempuan dan juga merupakan satu-satunya tempat dimana perempuan dapat mempersiapkan dan mendorong karier politiknya dalam parlemen. Perhatian khusus diberikan juga kepada keterlibatan perempuan muda dalam partisipasi politik.

7. Kendala-kendala Sosio-Ekonomi

Kondisi-kondisi sosio ekonomi memainkan peran menentukan dalam rekrutmen anggota legislatif perempuan baik dalam demokrasi yang baru maupun demokrasi yang telah lama mapan. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa status sosial dan ekonomi perempuan dalam masyarakat mempunyai pengaruh langsung pada partisipasinya dalam lembaga-lembaga politik dan badan-badan pemilihan. Sebagai contoh, para peneliti menunjukkan korelasi antara rekrutmen legislatif perempuan dengan proporsi kerja perempuan di luar rumah, maupun persentase tingkat pendidikan perempuan. Menurut beberapa peneliti, kondisi-kondisi sosio-ekonomi berada di tempat kedua dalam sistem pemilihan pada rekrutmen perempuan di badan legislatif dalam demokrasi yang sudah mapan.

Kendala-kendala sosio-ekonomi mempengaruhi partisipasi perempuan dalam parlemen yang selanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kemiskinan dan pengangguran;
- Kurangnya sumber-sumber keuangan yang memadai;
- Buta huruf dan terbatasnya akses ke pendidikan dan pilihan profesi;
- Beban ganda mengenai tugas-tugas rumah tangga dan kewajiban profesional.

Dua kendala terbesar bagi perempuan dalam memasuki parlemen adalah lemahnya konstituante dan lemahnya sumber-sumber keuangan. Perempuan berpindah dari rumah ayahnya ke rumah suaminya ke rumah mertuanya. Mereka seperti pengungsi. Mereka tidak mempunyai tempat untuk membangun hubungan dengan masyarakat atau membangun pengetahuan dan pengalaman tentang isu-isu

itu. Lebih jauh mereka tidak memiliki uang sendiri, uang milik ayah mereka, suami mereka atau mertua mereka. Meningkatnya biaya pencalonan untuk kampanye yang efektif, telah menjadi kendala serius yang lain bagi perempuan di dunia berkembang.

8. Feminisasi Kemiskinan dan Pengangguran

Perempuan terdiri dari 31 persen dari total tenaga kerja resmi di negara-negara industri maju dan 46,7 persen di seluruh dunia. Banyak dari perolehan ekonomi yang sumbangkan perempuan di negara-negara industri maju kini menghadapi bahaya erosi yang serius, yang tampaknya merupakan akibat dari restrukturisasi ekonomi global dan domestik. Ini tampak jelas dalam pembalikan kecenderungan jangka panjang mengenai perempuan yang memasuki angkatan kerja : untuk pertama kalinya lebih dari 25 tahun, tahun 1990-an memperlihatkan ambruknya rata-rata partisipasi tenaga kerja perempuan.

Pada saat yang sama, disebagian besar negara, aktivitas buruh perempuan tanpa upah adalah dua kali lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, dan nilai ekonomi dari buruh perempuan tanpa upah diperkirakan 10-35 persen dari GNP dunia (atau sekitar US\$ 11 trilyun). Ada kesenjangan yang signifikan antara status perempuan dan laki-laki diseluruh bangsa. Berbagai penelitian mengungkapkan adanya peningkatan diskriminasi gender dalam gaji, rekrutmen, promosi dan pemecatan, maupun meningkatnya segregasi profesional dan feminisasi kemiskinan. Menurut statistik Perserikatan Bangsa Bangsa, 1,3 milyar penduduk dunia hidup dalam keadaan kemiskinan, dan 70 persen diantaranya adalah perempuan. Kesenjangan gender dalam pendapatan tercatat diseluruh dunia : upah rata-rata

perempuan setara dengan 75 persen dari upah rata-rata laki-laki (tidak termasuk upah pekerja dibidang pertanian). Krisis ekonomi di berbagai negara yang dikenal dengan “demokrasi yang sedang berkembang” telah memperparah resiko kemiskinan bagi perempuan, seperti pengangguran, yang mungkin akan meningkatkan feminisasi.

Perempuan adalah kontributor utama pada ekonomi nasional baik melalui buruh upahan maupun tanpa upah. Sejah masalah yang selama ini diperhatikan, maka input perempuan pedesaan dan perannya sebagai perempuan pemilih yang signifikan tidak seharusnya diremehkan. Meskipun pentingnya peran sosial dan biologis perempuan sudah jelas, namun inputnya di segala bidang kehidupan serimng tidak diakui. Mengikis kemiskinan akan mempunyai pengaruh positif terhadap meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses demokrasi. Pemberdayaan ekonomi perempuan, bersama-sama dengan pendidikan dan akses ke informasi akan membebaskan perempuan dari keterkungkungan rumah tangga ke pemenuhan partisipasi dalam politik dan pemilihan yang politis.

Salah satu karakteristik paling penting dari masyarakat yang mengkaitkan tingkat representasi perempuan adalah tahap pembangunan suatu negara. Pembangunan mengarah pada suatu kebangkitan nilai-nilai tradisional, menurunnya angka kematian, meningkatnya urbanisasi, partisipasi tenaga kerja dan pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan, dan perubahan perilaku dalam persepsi berkenaan dengan peran perempuan yang memadai- semua faktor tersebut yang meningkatkan sumber-sumber politik perempuan dan mengurangi kendala-kendala yang ada terhadap aktivitas politik mereka.

Satu karakteristik perkembangan yang telah terbukti penting khususnya bagi representasi perempuan di negara-negara barat adalah partisipasi mereka rata-rata lebih tinggi dibandingkan partisipasi perempuan di bidang tenaga kerja (Anderson, 1975; Welch, 1977; Togeby, 1994) Dan jika mereka pindah ke tempat lain masuk ke tenaga kerja maka akan memunculkan pengaruh meningkatnya kesadaran perempuan; perempuan menjadi terpolitisasi. Pembangunan yang lebih besar meningkatkan jumlah perempuan yang mungkin mempunyai pengalaman dan posisi formal, seperti contohnya di serikat kerja atau organisasi-organisasi profesional. Kultur berkaitan dengan pembangunan, dan karena pembangunan meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat maka secara relatif mereka menjadi lebih setara dengan laki-laki.

Kultur dapat juga mempunyai pengaruh sendiri. Dua negara dapat hampir setingkat dari segi pembangunan, tetapi perempuan mungkin secara substansial jauh lebih setara di satu negara dibandingkan negara lainnya. Sementara kultur secara terus menerus telah dipercaya menjadi sesuatu yang penting, namun demikian sulit untuk secara langsung menguji pengaruhnya. Dalam beberapa penelitian belakangan, seperti mewakili sebuah kultur, saya mengembangkan ukuran yang menggunakan suatu kelompok variabel, khususnya rasio melek huruf perempuan terhadap melek huruf laki-laki, rasio partisipasi tenaga kerja perempuan terhadap partisipasi tenaga kerja laki-laki, dan rasio perempuan yang berpendidikan universitas terhadap laki-laki berpendidikan universitas (Matland, 1998). Asumsinya adalah bahwa ketika perempuan mendekati laki-laki dalam tingkat melek huruf, partisipasi tenaga kerja, dan pendidikan universitas – dan kemudian menjadi setara dengan laki-laki dalam lingkup sosial – mereka mungkin lebih tampak setara dengan laki-laki dalam lingkup

politik, dan oleh karena itu representasinya akan meningkat. Hipotesa ini tercipta sebagai penggambaran bahwa kultur-kultur sangat kuat berkaitan dengan representasi perempuan.

Penting untuk dicatat bahwa sementara penelitian mengenai model representasi perempuan dalam demokrasi yang sudah mapan telah berhasil mengidentifikasi sebab-sebab dari perbedaan-perbedaan, namun upaya-upaya untuk model representasi perempuan di negara-negara berkembang kurang berhasil. Faktor-faktor yang mendorong berbagai perbedaan dalam representasi negara-negara yang sudah mapan jelas dapat dipahami. Kami mempunyai banyak pemahaman yang lemah tentang representasi di dunia berkembang. Di dunia berkembang, tak satupun variabel ditemukan signifikan diantara demokrasi-demokrasi yang mapan, tidak juga beberapa variabel yang masuk akal lainnya, yang terbukti mempunyai pengaruh yang konsisten (Matland, 1998b).

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa ada suatu jalan keluar, suatu tingkat pembangunan minimal yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu fondasi bagi variabel lain seperti sistem pemilihan dan partisipasi tenaga kerja perempuan, agar mempunyai pengaruh. Tingkat pembangunan yang lebih rendah, faktor-faktor yang membantu perempuan memperoleh representasi di negara-negara yang lebih maju secara sederhana tidak mempunyai pengaruh. Kelihatan bahwa di negara-negara kurang berkembang, ada kekuatan yang menyatu dan begitu besar untuk menantang aktivitas politik perempuan berkaitan dengan peraturan yang membolehkan representasi minimal. Namun dengan meningkatnya pembangunan, perubahan kultur mulai terjadi. Tambahan lagi semakin banyak perempuan mulai

memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk menjadi sangat berkuasa secara politis – sumber-sumber seperti pendidikan, upah pengalaman tenaga kerja, dan pelatihan profesi yang mendominasi politik. Hal ini mengarah pada terbentuknya massa kritis. Ketika sejumlah perempuan dengan sumber-sumber penting menjadi substansial, kemudian mereka mulai menjadi kelompok kepentingan yang efektif menurut representasi yang lebih besar. Pembangunan adalah bagian yang menentukan dari proses ini.

9. Beban Ganda

Dibanyak negara, perempuan membawa suatu ketidakseimbangan pembagian kerja rumah tangga. Partisipasi perempuan dalam politik selanjutnya dibatasi oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan akses ke informasi. Harus diakui bahwa adalah sulit bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik ketika perhatian utamanya adalah kelangsungan hidup dan mereka tidak mempunyai pilihan kecuali untuk meluangkan lebih banyak waktunya berusaha memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Namun, disamping itu, beberapa perempuan boleh jadi menjalankan kerja penuh waktu sebagai istri dan ibu maupun karier penuh waktu lainnya (seperti peneliti, ahli hukum, dokter). Menjadi anggota parlemen dalam kondisi seperti itu kemungkinan akan dianggap sebagai pekerjaan penuh waktu yang ketiga.

Perempuan percaya bahwa masuk ke dalam parlemen berarti memilih diantara kehidupan pribadi dan kehidupan publik. Persoalannya bukan disini, sebaliknya, perempuan harus menganggap kehidupannya sebagai suatu keberlangsungan. Mereka harus memutuskan apa yang ingin mereka raih dalam kehidupan dan prioritas tujuan-tujuannya dalam tatanan kronologis. Ada waktu yang tepat untuk

meraih setiap tujuan ini, apakah menjadi seorang istri, ibu, profesional atau anggota parlemen, hidup ini panjang dan perempuan dapat meraih banyak hal daripadanya.

Ketika perempuan menjadi politisi, ia tidak berhenti menjadi perempuan. Keperempuanan ini yang harus berada di tempat pertama, karena ia mengandung kekuatan intelektual dan potensi-potensi kreatif yang berbeda. Kendala-kendala ideologis dan psikologis bagi perempuan dalam memasuki parlemen mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki.
- Kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri.
- Persepsi perempuan tentang politik sebagai permainan kotor.
- Cara bagaimana perempuan digambarkan dalam media massa.

Perempuan telah mencoba masuk dalam dunia politik dan berusaha bersikap seperti laki-laki. Ini tidak akan berjalan. Kami harus membawa perbedaan kami, emosi kami, cara kami melihat sesuatu, bahkan penelusuran kami terhadap proses. Di banyak negara, tradisi tetap berlaku untuk menekan, bahkan sering mendikte, peranan utama perempuan sebagai ibu dan istri. Sistem nilai tradisional, kuat dan patriarki menyokong peranan-peranan yang terpisahkan secara seksual, dan apa yang disebut sebagai “nilai-nilai kultural tradisional” menghalang-halangi kemajuan, perkembangan dan partisipasi perempuan dalam setiap proses politik. Masyarakat di seluruh dunia didominasi oleh suatu ideologi tentang “kedudukan perempuan”. Menurut persepsi ini, perempuan tidak harus memainkan peran “ibu yang bekerja”.

yang secara umum mendapat upah rendah dan apolitis. Disamping itu, di beberapa negara berkembang, laki-laki bahkan mengajarkan perempuan bagaimana cara memilih.

Inilah lingkungan yang dihadapi banyak perempuan, satu lingkungan di mana citra kolektif tertentu seorang perempuan dalam peran-peran tradisional dan apolitis terus mendominasi. Citra seorang pemimpin perempuan menuntut agar ia bersifat aseptik dalam berbagai sikap dan pernyataannya, seseorang yang dapat diidentifikasi sebagai seorang perempuan hanya melalui ciri-ciri nonseksualnya. Sering disangka sebagai tidak dapat diterima, atau bahkan memalukan dalam kesadarn masyarakat, bagi seorang perempuan bersikap terbuka tentang hakikat kefeminimannya adalah wajar. Kenyataannya, semakin bersikap otoritatif dan “jantan” seorang perempuan, semakin ia cocok terhadap aturan permainan laki-laki yang tidak tertulis. Itulah sebabnya mengapa politisi perempuan pada umumnya, dan anggota parlemen perempuan khususnya, harus mengatasi kesulitan tentang perasaan tidak menyenangkan ini dalam arena politik seakan-akan mereka berada di suatu tempat yang bukan tempat mereka, dan berperilaku dengan cara-cara yang tidak alamiah bagi mereka.

Perempuan seringkali menginternalisasikan beberapa hal dari ide ini, pada akhirnya merasakan rasa bersalah ketika mereka merasa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kesan yang hampir tidak masuk akal ini. Rasa bersalah ini tidak mungkin hilang begitu saja, dan ini terkait dengan perasaan untuk harus meminta maaf karena keperempuanannya sendiri atau karena mengkhianati rasa keperempuanannya, ketika seharusnya kaum perempuan tersebut merasa bangga atas keduanya. Sampai mereka

dapat mendamaikan (atau membuat pilihan) antara kesan kolektif tertentu, stereotipe yang menjadi sulit dan akan berat bagi mereka untuk mengakomodasikan berbagai harapan yang saling berbenturan ini. Seorang perempuan haruslah siap menghadapi kenyataan bahwa ketika ia menjadi seorang politisi, ia tidak akan berhenti menjadi perempuan. Keperempuanan inilah yang harus ditempatkan lebih dulu, karena ia mengandung berbagai potensi kreatif dan kekuatan intelektual. Kemampuan mengambil keputusan dan menerapkannya bukanlah karakter khusus gender, melainkan sifat kemanusiaan pada umumnya : dengan kata lain, seorang laki-laki memegang kekuasaan adalah wajar, dan seorang perempuan memegang kekuasaan adalah juga alami, atau seharusnya memang demikian.

Perempuan tidak mempunyai hak untuk menangis; itu hanya hak istimewa laki-laki. Seorang anggota parlemen laki-laki bahkan seorang menteri, dapat menangis. Itu normal. Itu bukan emosional, tapi itu menjadi berakal. Namun perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi lemah untuk menangis, untuk menunjukkan emosinya – karena kami hidup dalam suatu zaman di mana kita berada dalam politik, kami harus bersikap lebih seperti seorang laki-laki.

BAB III

TANGGAPAN PUBLIK TERHADAP PEREMPUAN DI PARLEMEN

1. Kurangnya Kepercayaan

Kurangnya rasa percaya diri adalah salah satu sebab utama atas kurang terwakilinya perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal, termasuk parlemen, pemerintahan, dan partai-partai politik. Dengan adanya kepercayaan diri dan tekad yang bulat, perempuan dapat meraih derajat tertinggi dalam proses politik. Untuk itulah mengapa perempuan harus percaya pada diri mereka sendiri dan harus membuang jauh persepsi yang berkembang luas bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin mereka. Perempuan setara dan dapat memperjuangkan hak-haknya. Perempuan adalah juru kampanye, organisatoris dan mobilisator dukungan yang sangat baik, tetapi rasa khawatir kadang-kadang menghalangi mereka untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Begitu kami berada dalam parlemen, kami tidak harus memberikan kesan bahwa kami lain daripada yang lain, perempuan berbakat, secara khusus diciptakan oleh Tuhan untuk memberikan pelayanan seperti pendeta. Tidak, kami harus mengatakan pada perempuan lain bahwa anda adalah seperti kami, dan anda juga dapat masuk ke parlemen, dengan banyak berjuang, dengan pendidikan, dengan bakat yang dimiliki.

2. Persepsi Politik Sebagai Hal Kotor

Dibeberapa negara, perempuan menganggap politik sebagai suatu permainan "kotor". Ini telah memukul rasa percaya diri perempuan atas kemampuannya untuk

berhadapan dengan proses politik. Kenyataannya, persepsi seperti ini merupakan hal umum di seluruh dunia. Sayangnya persepsi ini merefleksikan realitas di berbagai negara dan meskipun berbagai alasan mengenai hal ini berbeda-beda, namun ada beberapa kecenderungan umum.

Basis dari korupsi yang pasif dapat dijelaskan melalui suatu pertukaran antara kemajuan dan keuntungan dari pasar publik (seperti legalisasi, anggaran belanja), dan pasar ekonomi (seperti dana, suara, dan jabatan), yang memperoleh keuntungan finansial dengan menghindari kompetisi dan mendorong perkembangan kondisi-kondisi yang bersifat monopolistik. Di samping hal ini, kenaikan biaya kampanye pemilihan yang signifikan telah menjadi jelas yang pada gilirannya meningkatkan godaan untuk menggunakan berbagai sumber dana yang tersedia itu.

Korupsi bisa mempunyai banyak wajah. Penyuapan dan pemerasan dalam sektor publik, begitu juga pengadaan barang dan jasa, merupakan perwujudan kunci dari tindak korupsi. Meskipun demokrasi-demokrasi (negara-negara) berkembang membutuhkan waktu untuk membangun dan mengembangkan akar-akarnya, korupsi telah menyebar luas di negara-negara dimana proses transformasi ekonomi dan politik terbentuk di tengah kekosongan masyarakat madani, dan di mana lembaga-lembaga baru bermunculan, namun demikian, di berbagai tempat dimana perubahan dalam sistem ekonomi dan politik telah terjadi..., ekonomi pasar telah menjadi sama dengan hukum rimba, mafia dan korupsi.

Lain daripada itu, meningkatnya kemunafikan merupakan gambaran umum yang selalu muncul di negara-negara yang menganut rezim sentralistis dan otoriter... Ada "aturan-aturan untuk bertahan hidup" (*survival rules*) dalam suatu ekonomi

yang mengalami kekurangan terus menerus, yang sebenarnya berlawanan dengan ide-ide yang secara resmi dinyatakan oleh negara. Di negara-negara miskin, pendanaan partai-partai politik dan keberlangsungan hidup media masa yang independen tetap merupakan masalah besar yang tidak terpecahkan bagi perkembangan fungsi-fungsi demokratik.

Tingginya biaya untuk penyuaipan dan pemerasan bagi suatu masyarakat telah diakui kebenarannya. Banyak pemerintah dan para pemimpin bisnis telah menyatakan keinginannya untuk mengekang dan mengeliminasi korupsi. Tetapi ini bukanlah tugas yang mudah : korupsi telah dibuat mengakar dalam sistem oleh beberapa pihak yang turut melanggengkannya melalui penyuaipan. Tidak dapat dihindari korupsi mengakibatkan terciptanya kondisi dan kesempatan yang menguntungkan bagi keberadaan manifestasi paling negatif dari kejahatan yang terorganisir, faktor-faktor ini mengkombinasikan ketakutan perempuan dan memprovokasi ketakutan mereka akan kehilangan anggota keluarganya, yang semuanya menghalang-halangi keterlibatan mereka dalam politik atau pencalonan diri mereka dalam lembaga-lembaga yang terpilih.

Meskipun persepsi korupsi mungkin tidak selalu menjadi suatu refleksi yang sesungguhnya dari keadaan yang sebenarnya mengenai berbagai urusan, namun persepsi itu mempengaruhi sikap perempuan terhadap karier politik. Apakah ini suatu kebetulan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang moderat dan rendah tampaknya mempunyai tingkat representasi perempuan yang lebih tinggi dalam badan-badan terpilih. Sebagai contoh, Norwegia, Finlandia, Swedia, Denmark dan Selandia Baru merupakan negara-negara yang paling tidak korup, dan anggota

parlemen perempuan di negara-negara ini terdiri dari 30 hingga 43,4 persen dengan kata lain, lima hingga sepuluh kali lebih banyak.

Perempuan yang membuat keputusan untuk mengadakan pemilihan harus menganggap semua keadaan ini untuk dipertimbangkan dan siap melawan “penyakit” korupsi tersebut. Karena korupsi memerlukan kerahasiaan, dan demokrasi berarti meningkatnya keterbukaan sebagai akibat dari pluralisme politik dan kebebasan pers, maka liberalisasi politik harus membasmi korupsi. Demokrasi, yang memastikan partisipasi nyata dari masyarakat dan pembentukan kekuatan perlawanan yang efisien, akan menyumbang pada pengekangan korupsi.

Pada saat yang sama, kekuatan pasar tidak dapat mengganti peraturan perundangan. Liberalisasi ekonomi haruslah memberi kontribusi pada usaha-usaha pengurangan fenomena korupsi, meski hal ini tidak akan terjadi secara otomatis. Ekonomi pasar yang mendapat dukungan perangkat hukum akan mengurangi kesempatan terjadinya tindak korupsi. Karenanya, tetap penting untuk memiliki komitmen politik dan keinginan untuk menghapus fenomena negatif ini dari masyarakat dengan memasukkan isu-isu ini dalam agenda politik. Perempuan dapat memberikan sumbangan besar dalam bidang ini.

3. Peran Media Massa

Media massa pantas disebut sebagai pilar keempat kekuasaan, karena pengaruhnya terhadap opini dan kesadaran publik. Media massa di berbagai negara mempunyai dua peran : sebagai pencatat rangkaian peristiwa yang sedang terjadi, dan sebagai pemberi informasi mengenai opini publik, karenanya membantu mengembangkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Acapkali, media massa

cenderung meminimalkan peliputan berbagai peristiwa dan kepentingan perempuan. Media massa, termasuk publikasi-publikasi perempuan dalam masyarakat, tidak menginformasikan secara layak hak-hak dan peran-peran perempuan dalam masyarakat, tidak mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki posisi perempuan. Umumnya media di dunia belum menyentuh kenyataan bahwa perempuan adalah korban pertama dari reformasi dan perubahan ekonomi yang terjadi di suatu negara, umpamanya mereka adalah kelompok pertama yang kehilangan pekerjaan. Kenyataan bahwa perempuan sangat teralienasi dari proses pengambilan keputusan juga diabaikan oleh media.

Media bisa dimanfaatkan untuk memperkuat bias gender dan meningkatkan stereotipe tentang “kedudukan perempuan”, mendorong masyarakat dan pemerintahan konservatif menimpakan kesalahan pada perempuan atas kegagalannya dalam kebijakan keluarga, dan memperkuat ide bahwa perempuan bertanggung jawab atas buruknya masalah sosial, seperti perceraian dan meningkatnya kejahatan-kejahatan kecil. Kecenderungan meluas lainnya di media adalah menggambarkan perempuan sebagai objek kecantikan. Dalam hal ini, perempuan diidentifikasi dan diobyekkan sesuai dengan gendernya, dan dibentuk untuk menginternalisasikan gagasan tertentu mengenai kecantikan dan daya tariknya lebih terkait dengan kapasitas fisik perempuan daripada kecakapan mental mereka. Pendekatan seperti ini mendorong stereotipe patriarki berjangka panjang mengenai “kaum yang lemah”, dalam hal ini perempuan menjadi obyek seksual dan warga negara “kelas dua”.

Tidak dapat disangkal bahwa media massa juga menceritakan kisah-kisah tentang politisi perempuan dan pelaku bisnis perempuan serta kesuksesan mereka, tetapi jenis pengungkapan seperti ini termasuk jarang, lebih tipikal adalah penyajian topik seperti peragaan busana, bintang film, seni, dan rahasia pemuda idaman. Tidak mengherankan berbagai pandangan seperti itu hampir tidak mendorong perasaan perempuan terhadap harga diri dan rasa hormat diri mereka atau mendorong mereka untuk mengambil posisi tanggung jawab publik.

Peran media massa tidak dapat dibebankan secara penuh dalam suatu proses pemilihan, dan masih belum berdasarkan penelitian komparatif dan global yang memadai. Secara praktis dikatakan, jika ada kelemahan pengungkapan yang pantas mengenai isu-isu perempuan dan aktivitas-aktivitas anggota parlemen perempuan, ini berakibat pada tiadanya suatu forum untuk membangkitkan kesadaran publik mengenai isu-isu tersebut. Dan sebaliknya, ini memperlihatkan bentuk kurangnya dukungan para pemilih untuk anggota parlemen perempuan. Media massa masih perlu mengakui martabat dan nilai yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Misi utama gerakan perempuan adalah untuk menanamkan tipe percaya diri dan keyakinan yang benar diantara perempuan serta memperkuat sikap tegas diantara mereka. Segala sesuatunya tidak ada yang datang begitu saja, ia harus diperjuangkan. Pekerjaan perempuan adalah membangun suatu masyarakat beradab sesuai dengan paradigma yang merefleksikan nilai-nilai kekuatan-kekuatan serta aspirasi mereka, dengan demikian memperkuat kemampuan mereka untuk diperhitungkan dan berpartisipasi dalam proses politik. Kendala-kendala bersama situasi politik memiliki variasi di setiap negara. Dalam demokrasi yang sudah mapan, sebagaimisal,

kendalanya mungkin tidak sebanding dengan partai-partai politik di mana terdapat pembatasan secara resmi, seperti partai-partai politik harus memperoleh lima persen suara awal. Dalam demokrasi yang sedang berkembang, diperlukan akses ke media massa atau akses ke sumberdaya untuk menyelenggarakan kampanye pemilihan. Dalam sistem pemilihan harus diperbarui untuk memberi perempuan hak efektif untuk dipilih.

Meniadakan perempuan dari posisi kekuasaan dan lembaga-lembaga yang terpilih, berarti melemahnya perkembangan prinsip-prinsip demokratik dalam kehidupan publik serta mencegah perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Mayoritas lembaga-lembaga yang memerintah didominasi oleh laki-laki yang mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Lembaga-lembaga politik pemerintah yang didominasi laki-laki tidak mempromosikan perempuan atau isu-isu perempuan. Jadi tetap penting sekali untuk menekankan bahwa perempuan sendiri harus mengorganisir dan memobilisasi jaringan kerjanya, belajar mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka dengan organisasi-organisasi yang berbeda, dan mendorong mekanisme untuk meningkatkan representasi diri mereka sendiri. Akhirnya dua bab berikut ini membahas dua mekanisme paling signifikan yang telah digunakan untuk mengatasi banyak kendala pada representasi legislatif perempuan : yaitu kuota dan sistem pemilihan.

BAB IV KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyulitkan perempuan masuk ke dalam parlemen sebagaimana yang telah dikemukakan adalah :

- a. Lemahnya akses perempuan dan integrasi ke dalam lembaga-lembaga politik;
- b. Menyesuaikan banyak lembaga-lembaga ini sesuai dengan standar laki-laki dan perilaku politik;
- c. Lemahnya dukungan partai, termasuk uang dan sumber-sumber lainnya untuk membiayai kampanye perempuan dan mendorong kredibilitas politik, ekonomi, sosial, dan politik mereka;
- d. Kurangnya perhatian media terhadap potensi dan kontribusi perempuan, yang juga mengakibatkan kurangnya pemilih bagi perempuan;
- e. Kurangnya koordinasi dengan dan dukungan dari organisasi perempuan dan organisasi masyarakat lainnya;
- f. Rendahnya kepercayaan dan penghargaan diri perempuan, didukung oleh pola-pola kultural tertentu yang tidak memudahkan akses perempuan pada karir politik, dan
- g. Jenis sistem pemilihan maupun kurangnya syarat kuota.

DAFTAR PUSTAKA

- Arndt, H. W. 1989. *Economic Development: The History of an Idea*. Chicago: The University of Chicago Press
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1989. "Perkembangan Ekonomi Indonesia Selama Empat Tahap Pelita, 1969 1970-1988 1989", prasaran untuk Sidang Pleno ISEI, Bukittinggi, 29 Juni, dalam Budiman, Arif. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publishers
- Hadiwijono, Harun. 1993. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius
- Hoselitz, Bert F. 1971. "Economic Growth and Development: Non-economic Factors in Economic Development", dalam Budiman, Arif. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia
- Meier, Gerald M. 1989. *Leading Issues in Economic Development*. New York: Oxford University Press
- Moeljarto, T. 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Schumacher, E.F. 1973. "Small is Beautiful: Economics as if People Mattered". New York: Harper & Row, dalam Arndt, H.W. 1989. *Economic Development: The History of an Idea*. Chicago: The University of Chicago Press
- Streeten, P. dan S.J. Burki. 1978. "Basic Needs: Some Issues", *World Development*, no.3, p. 418, dalam Arndt, H.W. 1989. *Economic Development: The History of an Idea*. Chicago: The University of Chicago Press
- McNamara, Robert.S. 1976. Address to the Board of Governors, *World Bank, Manila*, dalam Arndt, H.W. 1989. *Economic Development: The History of an Idea*. Chicago: The University of Chicago Press
- Sastrapratedja. 1982. *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*. Jakarta: Gramedia
- Sindhunata. 1982. *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam rangka Sekolah Frankfurt*. Jakarta: Gramedia
- Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius

Wibisono, Koento. 1982. Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme August Comte. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

World Commission on Environment and Development. 1987. "Our Common Future", Oxford University Press, Oxford, dalam Friedmann, John. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative Development. Cambridge: Blackwell Publishers

